

SIMBA

Prosiding (Seminar Inovasi Manajemen Bisnis dan Akuntansi)
ISSN Online 2686-1771
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun



PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *LEVERAGE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

(Studi Empiris pada Perbankan Syariah di Indonesia
Periode 2010-2019)

Ade Dwi Resita¹⁾, Anggita Langgeng Wijaya²⁾, Nik Amah³⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Madiun

aderesita275@gmail.com¹⁾, gonggeng14@gmail.com²⁾,

sigmaku87@gmail.com³⁾

Abstract

This study aims to determine "The Effect of Good Corporate Governance and Leverage on Tax Avoidance in Islamic Banking in Indonesia 2010-2019 Period". The dependent variable in this study is Tax Avoidance which is proxied by the Effective Tax Rate (ETR). The independent variables consist of the Audit Committee, the Sharia Supervisory Board, and Leverage, which is proxied by the Debt To Equity Ratio (DER). The population in this study was 14 banks. The sampling technique used purposive sampling according to certain criteria and samples that can be taken from 8 banks. The data analysis method used is multiple linear regression analysis. The feasibility test of the data used the classic assumption test, namely normality test, multicollinearity, autocorrelation, and heterocedasticity (glejser). The results prove that the Audit Committee variable has no effect on ETR. The Sharia Supervisory Board variable has no effect on ETR, and the DER variable has no effect on ETR. Before making a tax payment, it would be better if all related parties check it first in order to avoid tax avoidance because the tax paid is not in accordance with the provisions.

Keywords: Audit Committee, Sharia Supervisory Board, Leverage, Tax Avoidance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui "Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2019". Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance* yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR). Variabel independen terdiri dari Komite Audit (KA), Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt To Equity Ratio* (DER). Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 14 bank. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu sesuai kriteria tertentu dan sampel yang dapat diambil 8 bank. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan analisis regresi linier berganda. Uji kelayakan data menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokedastisitas (*glejser*). Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel KA tidak berpengaruh terhadap ETR. Variabel DPS tidak berpengaruh terhadap ETR, dan variabel DER tidak berpengaruh terhadap ETR. Sebelum melakukan pembayaran pajak akan lebih baik jika semua pihak terkait melakukan pengecekan terlebih dahulu agar dapat menghindari terjadinya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dikarenakan pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan ketentuan.

Kata kunci : komite audit, dewan pengawas syariah, *leverage*, *tax avoidance*

PENDAHULUAN

Perbankan Syariah termasuk lembaga perbankannya berjalan serasi menggunakan dasar-dasar syariah yang ada. Dalam setiap kegiatan usahanya, bank syariah senantiasa menggunakan hukum-hukum islam yang berada dalam Al-Qur'an juga dengan Hadistnya. Perbankan Syariah merupakan perbankan yang mulai dikenal dikalangan masyarakat di era modern ini.

Perkembangan dalam perbankan syariah tersebut tidak bersamaan dengan kebijakan mengenai peraturan perpajakan yang jelas pula. Pemerinlah menganggap segala transaksi di perbankan syariah menggunakan tumpuan aturan perpajakan yang bersifat umum untuk perbankan syariah. Salah satunya adalah pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas segala transaksi dengan dasar akad jual beli syariah yaitu murabahah, salam dan istishna. Alasan yang diberikan pemerintah ialah transaksi ini dianggap sebagai sarana jual beli seperti sebagaimana yang ada didalam perusahaan perdagangan. Pajak sendiri adalah salah satu unsur terpenting untuk penompang pendapatan sebuah negara. Di sisi lain, pajak berada diposisi salah satu keharusan disuatu bernegara, yaitu sebagai prasarana bangsa demi dapat serta dalam mendukung pengoperasian fungsi negara yang dibawah sama pemerintahan Indonesia. Kesadaran dan peran aktif masyarakat untuk memmbayar pajak sangat penting dan diperlukan dalam pemungutan pajak. Iuran pajak memang menekan pendapatan maupun aset secara perseorangan maupun kelompok tetapi pungutan ini akan dikembalikan kembali ke asosiasi melewati pengeluaran rutin juga pengeluaran-pengeluaran pembangunan (Suandy, 2011).

Setiap aktifitasnya syariah, pendapatan dalam bentuk bagi hasil margin laba akan dikenakan pajak pendapatan harus sama dengan peraturan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan bunga. Berbeda dengan untuk pendapatan lain dikenakan pajak penghasilan yang sama berdasarkan peraturan yang mengatur tentang segala jenis transaksi diantara perbankan syariah bersama nasabah yang menerima fasilitasnya. Segala bentuk pembiayaan di dalam perbankan syariah pembebanannya biaya sudah sesuai dengan peraturan Undang-undang Pajak Penghasilan. Bila ada pemindahan asset yang harus dilakukan untuk mematuhi peraturan syariah, akan tidak sama ke di maksudkan pemindahan aset seperti di Undang-undang Pajak Penghasilan.

Sebab demikian pemindahan demikian sama dengan pemindahan dari pihak 3 kepada nasabah, yang akan sama dengan pajak pendapatan sama berdasarkan peraturan perpajakan yang ada telah berlaku sekarang. Munculnya 2 peraturan mengenai perpajakan itu, maka harapannya akan dapat menyelaraskan pelaksanaan peraturan perpajakan dengan tindakannya dalam usaha dengan prinsip-prinsip syariah (kemenkeu.go.id).

Penerapan mengenai penataan kelola perusahaan bagus (*Good Corporate Governance*) di penelitian ini tentang komite audit beserta dewan pengawas Syariah. Dalam dua bagian tersebut dapat saling mempengaruhi terhadap terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Komite audit didirikan dari dewan komisaris maka komite audit memiliki tanggung jawab terhadap dewan komisaris. (Damayanti dan Susanto, 2015). Dengan demikian komite audit sangat berpengaruh besar terhadap keterbukaan laporan perusahaan yang dapat dilihat oleh masyarakat luas. terjadinya transparansi di dalam pengelolaan perusahaan, yang dapat

mencegikan terjadinya pajak agresif, dengan demikian hal tersebut akan dapat digunakan untuk melakukan penghindari pajak.

Dewan pengawas syariah bertugas untuk melakukan pengawasan yang bertujuan untuk dapat memastikan apa yang diperbuat perusahaan sudah sama dengan prinsip-prinsip dan kode-kode etik syariah. Seorang dewan pengawas syariah harus dapat memastikan tidak akan ada kecurangan dan penyalahgunaan peraturan syariah dalam perusahaan, salah satunya untuk memastikan tidak ada terjadinya penghindaran pajak yang sering dilakukan sebuah perusahaan.

Leverage suatu tingkat utang yang sering dilakun oleh sebuah perusahaan dimana aktifitas pembiayaan. Namun jika perusahaan mempunyai perkembangan penjualan yang baik tahun ke tahun maka perusahaan tersebut bias dikatakan berkembang dengan baik. Apabila penjualannya bertambah, maka kemungkinan akan terjadinya penghindaran pajak juga besar.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menguji secara empiris pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)
2. Menguji secara empiris pengaruh dewan pengawas syariah terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)
3. Menguji secara empiris pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA

Kajian Teori

Pajak

Pajak merupakan salah satu ikut serta wajib kepada (WP) bagi negar dihutang seorang pribadi maupun sebuah badn seorang wajib pajak (WP) dengan tidak mengharapkan terjadinya akan timbal balk langsung, yang baik berupa paksaan, dan dalam pemungutanya yang dilaksnakan dengan peraturan undangundang (Darmawan dan Sukartha, 2014).

***Tax Avoidance* (ETR)**

Mengukur penghndaran pajak, (*tax avoidance*) melakukan memakai berbagai carasalah satunya dengan menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*). ETR adalah alat,yang dapat digunakan mengetahui seberapa besrr terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dilakukan suatu perusahaan. ETR dihtung memakai cara membag beban pajak harus dbayarkan sebuah perusahaan saatini menggunakan laba sebelumnya pajak. *Presentase total* dari beban pajak pendapatan yang dibayar oleh sebuah perusahaannya dari total pendapataan sebelumnya kena pajak diperoleh perusahaan merupakan gambaran dari ETR (Yoehana, 2013).

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

Komite Audit (KA)

Komite audit ialah sebuah komite, yang dibuat oleh seorang dewan komisaris beserta memiliki tanggung jawab penuh terhadap dewan komisaris. Sebuah perusahaan publik diwajibkan mempunyai seorang komite audit yang bertugas independen di dalam melaksanakan tugas juga pertanggungjawabannya. Seorang komite audit ditunjuk dan diberhentikan oleh dewan komisaris (BAPEPAM-LK, 2012).

Komite Audit (KA)

Komite audit didirikan seorang dewan komisaris maka komite audit memiliki tanggung jawabnya terhadap dewan komisaris (Damayanti dan Susanto, 2015). Dengan demikian komite audit sangat berpengaruh besar terhadap keterbukaan laporan perusahaan yang dapat dilihat oleh masyarakat luas. terjadinya transparansi di dalam pengelolaan perusahaan, yang dapat mengencikan terjadinya pajak agresif, dengan demikian hal demikian akan dapat digunakan tujuan penghindari pajak.

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Anggota Komite Audit Yang Ada Dalam Perusahaan}$$

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan pengawas syariah adalah anggota independennya perusahaannya berada disuatu bank syariah yang mempunyai kewajiban dengan pengawasan penerapannya aturan syariah didalam setiap aktifitas usaha bank. Di setiap pengawasan operasional bank syariah, seorang DPS diwajibkan untuk berpedoman dengan fatwa dewan syariah nasional agar dapat menyesuaikan dengan produk jasa dari bank.

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Tugas-tugas dewan pengawas syariah, dapat disimpulkan bahwa seorang dewan pengawas syariah bertugas untuk mencemati segala aspek dalam kebijakan syariah yang sesuai dengan produk syarat-syarat syariah. Maka seorang dewan pengawas syariah agar tidak melakukan pemantauan akan operasional di perusahaan perbankan dalam konteks resiko kerugian finansial. karena disebabkan diluar dari tugas dan wewenang dewan, pengawas syariah. Bahwa dewan pengawasan syariah memiliki tugas untuk menilainya kesyar'iahannya produknya dan komplainnya lainnya.

$$\text{Jumlah Dewan Pengawas Syariah} = \sum \text{Dewan Pengawas Syariah}$$

Leverage

Leverage ialah rasio mampu dipergunakan dalam mengukur besarnya perusahaannya dapat memanfaatkannya hutang yang dimilikinya untuk melakukan pembiayaan. *Leverage* adalah digunakannya hutang dengan tujuan membiayai investasi. Dari Sartono (dalam Kurniasih dan Sari, 2013: 59).

Leverage (DER)

Makin besar tingkat leverage perusahaan akan menyebabkan semakin besar kemungkinan

akan sebuah perusahaan tersebut bisa mengalami kenaikan beban pajak. Hal ini juga yang dapat menyebabkan *leverage* akan dapat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) didalam perusahaan. Sebab itu, dalam menggunakan hutang diwajibkan sama diantara keuntungannya dan juga kerugiannya (Tampubolon, 2005:37). Pada penelitian ini leverage diukur dengan total debt to equity ratio dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Debt To Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Equitas}} \times 100\%$$

Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Seorang Komite audit memiliki tanggung jawabnya terhadap seorang dewan komisaris demi dapat melaksanakan kewajiban juga tugasnya. Anggota komite audit dibuat dari seorang dewan komisarisnya (BAPEPAM-LK, 2012). Perusahaannya publik diwajibkan mempunyai komite audit secara independen dapat melaksanakan segala tugasnya dan tanggungjawabnya terhadap jawabnya. Komite audit wajib terdiri dari sekurangnya dari tiga orang, diantaranya adalah perusahaannya independen yang bertugas sebagai ketuanya komite audit (BAPEPAM-LK, 2012).

H₁ : Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap *Tax Avoidance*

Efektivitas seorang dewan pengawasnya syariah mempengaruhi besar terhadap pengambilan informasinya. Apabila terjadi adanya rapat akan kegunaan dari pengawasannya yang dilakukan seorang DPS akan keterkaitannya dengan keserasian syariah pernyataan yang semakin baik. Kualitas akan adanya pengungkapan sebuah laporan keuangannya yang bagus akan digunakan untuk terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) Bukair (2014).

H₂ : Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

3. Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Leverage (DER), menggambarkan tidak adanya pengaruh secara parsial *Leverage* (DER), akan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). (Handayani, 2017). Untuk pembiayaan perusahaan menjadikan transparansi penghindaran pajak berkaitan juga tarif pajak efektifnya, demikian disebabkan karena adanya peraturannya perpajakan berkaitan mengenai struktur dalam pendanaannya perusahaannya (Gupta dan Newberry, 1997).

H₃ : *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

4. Pengaruh Pengaruh komite audit, dewan pengawas syariah, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan *factor* yang memiliki pengaruh dalam perusahaan untuk terjadinya tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) salah satunya adalah penataan kelola perusahaan. Penerapannya tata kelola perusahaannya (*corporate governance*) didalam

penentuan kebijakan perpajakannya bisa membuat adanya pembayarannya terhadap pajak penghasilan perusahaannya (Darmawan & Sukartha, 2014) dikarena penataan kelolan perusahaannya tersebut harus bagus dipegang juga dapat menghasilkan laporan laba lebih bagus untuk dapatpula dipercayai sebagaimana dasarnya penentuan biaya pajak.

Leverage menggambarkan dimana tingkat utang yang digunakan membayar sebuah investasinya (Sartono, 2002 dalam Kurniasih & Sari, 2013). Banyaknya tinggi penggunaan hutang bagi perusahaan, sehingga semaki banyaknya jumlahnya akan biaya bubunya melonjak, sehinga mampu memperkecil pendapatan sebelum dikenai pajak perusahaan kemudian akan memperkecil besarnya pajak tersebut kemudian diwajibkan harus di bayar oleh perusahaan, (Surbakti, 2012 dalam Arianandini & Ramantha, 2018).

H₄ : Pengaruh komite audit, dewan pengawas syariah, dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh modal, likuiditas dan efisiensi terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK pengaruh secara parsial. Populasi penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2010 sampai dengan 2019. Sedangkan sampel diperoleh 8 Bank Umum Syariah menggunakan metode *purposive sampling*. Data sekunder penelitian diperoleh dari akses *website* perbankan dan diolah menggunakan metode analisis regresi berganda dengan pengujian hipotesis menggunakan uji statistik t(parsial).

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan berupa data keuangan yang berasal dari Laporan Tahunan Perusahaan (*Annual Report*).

Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini didapatkan dari Bank Indonesia akses melalui www.bi.go.id. Akses Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta akses *website* perbankan tersebut. Dengan alasan agar mendapat laporan yang valid serta sesuai yang dibutuhkan oleh peneliti

Teknik Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Peneliti melakukan statistic deskriptif dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran serta deskripsi data penelitian yang akan dianalisis (Ghozali, 2013). Data digambarkan melalui nilai rata-rata (*mean*), *standar deviasi*, *maksimum* dan *minimum*.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bermaksud guna mengukur apa pada model regresi, variabel bebas serta variable terikat semuanya mempunyai nilai normal ataupun tidak normal (Ghozali,

2013). Uji normalitas data dapat diukur dengan cara menggunakan *Kolmogrov-Smirnov*. Data *Kolmogrov-Smirnov* dikatakan memenuhi syarat, jika nilai *Kolmogrov-Smirnov* dan nilai *Asymptotic significance (2tailed)* lebih dari 0,05 (Ghozali, 2013).

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bermaksud untuk menguji apakah model regresi diperoleh adanya hubungan antara variabel dependen atau variable independent. Model regresi yang normal semestinya tidak terdapat korelasi diantarai variabel bebas. Apabila variabel bebas sama-sama berkorelasi, jadi semua variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal ialah variable bebas yang nilai korelasi antar sesame variabel bebas sama dengan nol (Ghozali, 2013).

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi mempunyai tujuan guna menguji apakah pada sebuah model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (atau sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain (Ghozali, 2013).

Menurut Ghozali (2013), uji adanya simultan memakai cara untuk melihat adakah variabel independen dapat secara bersamaan atau simulltan berpengaruh pada variabel depnden. Kriteria penmbuatan keputusan untuk uji statistik F adalah (Ghozali, 2013).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedasitas. Untuk melihat ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat pola titik-titik di *scatterplots* regresi. Apabila titik-titikk menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 sumbu Y dapat diarikan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda mampu menunjukkan hubungan antara variable dependen dengan variable independen apakah positif atau negative dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variable independen mengalami kenaikan atau penurunan (Ghozali, 2013). Persamaan regresi linier berganda penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

$$Y = Tax Avoidance$$

- a = Bilangan konstanta.
- X1 = Komite Audit
- B1 = Koefisien regresi variabel Komite Audit
- X2 = Dewan Pengawas Syariah
- B2 = Koefisien regresi variabel Dewan Pengawas Syariah
- X3 = *Leverage*
- B3 = Koefisien regresi variabel *Leverage*
- e = Error, asumsi e = 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 4.3
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
KA	56	-0.888	2.077	-0.00538	0.973357
DPS	56	-0.911	1.079	0.01325	1.001511
DER	56	-1.225	2.579	0.02248	1.012556
ETR	56	-1.904	2.291	-0.15183	0.767015
<i>Valid N (listwise)</i>	56				

Sumber : Data diolah SPSS V.25

Berdasarkan tabel diatas maka diketahui sebaran data statistik deskriptif dan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Komite Audit (KA)

Variabel KA mempunyai nilai minimum sebanyak -0,888 dan nilainya maksimumnya sebesar 2,077. Nilai standar deviasi sebanyak 0,97335 dan mean sebesar -0,00538 artinya data bermacam-macam dikarenakan nilai standar deviasi lebih banyak hasil mean.

2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Variabel DPS mempunyai nilai minimum sebanyak -0,911 dan juga nilai yang maksimumnya sebanyak 1,079. Nilai standar deviasi sebanyak 1,001511 dan mean sebesar 0,01325 artinya data bermacam – macam dikarenakan nilainya standar deviasinya harus lebih besar daripada mean.

3. *Leverage (DER)*

Variabel DER mempunyai nilai minimum sebesar -1,225 dan nilai maksimum sebanyak 2,579. Nilai standar deviasi sebesar 1,012556 dan mean sebesar 0,02298 maksudnya data bermacam dikarenakan nilai standar deviasi lebih besar dari pada mean.

4. *Tax Avoidance (ETR)*

Variabel ETR mempunyai nilai minimum sebanyak -1,904 dan juga nilai maksimum sebanyak 2,291. Nilai standar deviasi sebanyak 0,767015 juga mean sebanyak -0,15183 maksudnya data bermacam dikarenakan nilai standar deviasi lebih besar dibandingkan mean.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Tabel 4.5
Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		70	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.57310414	
Most Extreme Differences	Absolute	.181	
	Positive	.181	
	Negative	-.086	
Test Statistic		.181	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.018 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.014
		Upper Bound	.021

Sumber : Olah Data SPSS V.25

Dari uji normalitas dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa besarnya nilai signifikansi dari *Unstandardized Residual* adalah lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi tidak normal. Cara mengatasi data yang tidak terdistribusi normal dalam penelitian ini dilakukan *Outlier data* dan juga menggunakan *Monte Carlo Sig* yang akan membuat data menjadi normal. Sehingga diperoleh tabel dari hasil uji normalitas dengan menggunakan *Outlier data* dan juga menggunakan *Monte Carlo Sig* sebagai berikut :

Tabel 4.6
Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov*
Setelah Melakukan *Outlier dan Monte Carlo Sig*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		56
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.72309547
Most Extreme Differences	Absolute	.158
	Positive	.158
	Negative	-.083
Test Statistic		.158
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.105 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound

		Upper Bound	.113
--	--	-------------	------

Sumber : Olah Data SPSS V.25

Tabel diatas menunjukkan pengujian normalitas setelah dilakukan *Outlier data* dan juga menggunakan *Monte Carlo Sig* sehingga dapat diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig. (2- tailed)* adalah sebesar 0,113. Nilai tersebut menunjukkan probabilitas penerimaan 0,113 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 ($0,113 > 0,05$), maka dapat diartikan bahwasanya data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4.7
Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics		Keterangan
		Tolerance	VIF	
1	(Constant)			
	KA	0,789	1,267	Tidak terjadi Multikolienearitas
	DPS	0,796	1,257	Tidak terjadi Multikolienearitas
	DER	0,651	1,537	Tidak terjadi Multikolienearitas

Sumber : Olah Data SPSS V.25

Hasil tabel 4.4 perolehan setiap variabel bebas memiliki angka *Tolerance* > dari 0,10 (*Tolerance* > 0,10) sedangkan angka *VIF* < dari 10 (*VIF* < 10), dengan demikian bisa diartikan bahwasanya pada penelitian ini tidak terdapat multikolienearitas antar variabel independen.

Uji Autokorelasi

Tabel 4.8
Uji Autokorelasi *Durbin-Watson*
Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	1,597

Sumber : Olah Data SPSS V.25

Berdasarkan pengujian autokorelasi di tabel 4.8 di atas mampu dilihat nilai DW yang ada adalah 1,597. Dari Tabel DW dengan signifikansinya 0,05 dan jumlah data (n) = 70, beserta banyaknya variabel independen (k) = 3 diperoleh nilai batas bawah (dL) sebesar 1,4326 dan batas atas (dU) sebesar 1,8025. Dikarenakan nilai DW terletak berada antara dU juga $4-dU$ ($1,8025 < 1,597 < 2,1975$), sehingga disimpulkan jika terjadi autokorelasi.

Cara mengatasi data yang terjadi autokorelasi dalam penelitian ini dengan melakukan outlier data. Berikut ditampilkan tabel dari hasil output uji autokorelasi data dengan melakukan outlier data.

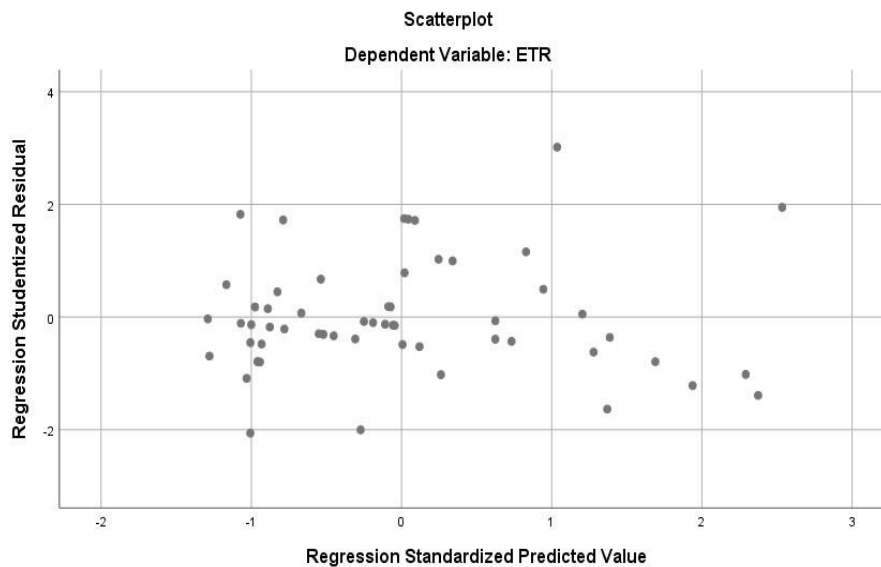
Tabel 4.9
Uji Autokorelasi *Durbin-Watson*
Setelah Melakukan *Outlier*
***Model Summary*^b**

Model	Durbin-Watson
1	1,311

Sumber : Olah Data SPSS V.25

Berdasarkan dari pengujian autokorelasi di tabel 4. di atas mampu dilihat nilai DW hasil dari model regresi ialah 1,311. Kemudian dari Tabel DW hasil signifikansinya 0,05 beserta jumlah data, (n) = 56, jumlah dari variabel independen (k) = 3 didapatkan nilai batas bawah (dL) sebesar 1,3424 dan batas atas (dU) sebesar 1,8124. Dikarena nilai DW terletak diantara dU dan 4-dU ($1,8124 < 1,311 < 2,1976$), maka artinya tidak ada autokorelasi positif maupun negatif.

Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Olah Data SPSS V.25

Gambar 4.1
Uji Heteroskedastisitas

Hasil dari uji heteroskedastisitas dapat dilihat bahwasanya pola data menyebar di atas dan di bawah garis horizontal 0, maka dapat diartikan bahwasanya model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas.

Hasil Pengujian Hipotesis
Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.10
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	-0.153	0.099
	KA	0.203	0.116
	DPS	-0.037	0.112
	DER	0.104	0.123

Sumber : Olah Data SPSS V.25

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4.11
Uji Regresi Determinasi R²
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,334 ^a	0,111	0,060

Sumber : Olah Data SPSS V.25

Dari hasil diatas, dapat dipantau bahwa Adjusted R Square mempunyai nilai sebanyak 0,060. Hal ini artinya jika prosentase variabel independen (KA, DPS, DER) akan berpengaruh terhadap variabel dependen (ETR) sebesar 6%. Kemudian sisanya, sebesar 94% dipengaruhi dari variabel lain di luar variabel penelitian.

Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Tabel 4.12
Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)
Coefficients^a

Model		t	Sig.
1	(Constant)	-1.535	0.131
	KA	1.750	0.086
	DPS	-0.328	0.744
	DER	0.845	0.402

Sumber : Olah Data SPSS V.25

Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel diatas dapat dijelaskan hasil sebagai berikut:

1. Variabel KA mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 1,750 beserta signifikansi 0,086. Nilai t_{tabel} sebesar 2,00665 yang berarti $t_{hitung} 1,750 < t_{tabel} 2,00665$ dan signifikansi $0,086 < 0,05$. Maka dapat diputuskan bahwa H1 ditolak yang berarti KA tidak berpengaruh terhadap ETR.
2. Variabel DPS memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0,328 beserta signifikansi 0,744. Nilai t_{tabel} sebesar 2,00665 yang berarti $t_{hitung} -0,328 < t_{tabel} 2,00665$ dan signifikansi $0,744 < 0,05$.

Sehingga dapat diputuskan bahwa H2 ditolak yang berarti DPS tidak mempengaruhi akan ETR.

3. Variabel DER mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 0,845 dengan signifikansi 0,402. Nilai t_{tabel} sebesar 2,00665 yang berarti $t_{hitung} < t_{tabel}$ 2,00665 dan signifikansi 0,402 < 0,05. Sehingga dapat diputuskan bahwa H3 ditolak yang berarti DER tidak mempengaruhi terhadap ETR.

Pembahasan

1. Pengaruh Komite Audit (KA) terhadap Tax Avoidance (ETR)

Dari penelitian tidak mendukung hipotesis pertama yang menyatakan “KA berpengaruh terhadap ETR”. Dapat dilihat dengan nilai t_{hitung} sebesar 1,750 dengan signifikansi 0,086. Nilai t_{tabel} sebesar 2,00665 yang berarti $t_{hitung} < t_{tabel}$ 2,00665 dan signifikansi 0,086 > 0,05. Maka dapat diputuskan jika H₁ ditolak yang berarti KA tidak berpengaruh terhadap ETR.

Karena Komite audit bertanggung jawab penuh terhadap laporan keuangan yang akan disebar luaskan ke masyarakat umum. Sehingga komite audit berperan aktif dalam penyampain laporan keuangan yang sesungguhnya, yang membuat seorang komite audit tidak akan membuat laporan yang tidak benar untuk perusahaan maupun untuk umum. Akan memungkinkan akan terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Tax Avoidance (ETR)

Dari penelitian tidak mampu menjawab hipotesis kedua bila menghasilkan “DPS mempengaruhi terhadap ETR”. Demikian dapat dilihat dengan nilai t_{hitung} sebesar -0,0328 dengan signifikansi 0,744. Nilai t_{tabel} sebesar 2,00665 yang berarti $t_{hitung} < t_{tabel}$ 2,00665 dan signifikansi 0,744 > 0,05. Sehingga dapat diputuskan jika H2 ditolak artinya DPS tidak mempengaruhi terhadap ETR.

Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas berdasarkan apa yang sudah diterapkan sesuai dengan Syariah-Syariah islam. Dimana pelanggaran aturan yang berlaku merupakan hal yang harus ditindak lanjut oleh dewan pengawas Syariah untuk dihapuskan dan ditiadakan, seperti pelanggaran aturan perpajakan adalah mengenai (*tax avoidance*) penghindaran pajak yang harus ditiadakan.

3. Pengaruh Leverage (DER) terhadap Tax Avoidance (ETR)

Kesimpulan menjawab hipotesis ketiga menyimpulkan “DER berpengaruh terhadap ETR”. Hal ini ditunjukkan dengan dengan nilai t_{hitung} sebesar 0,845 dengan signifikansinya 0,402. Nilai t_{tabel} sebesar 2,00665 yang artinya $t_{hitung} < t_{tabel}$ 2,00665 dan signifikansi 0,402 < 0,05. Akan diputuskan bahwa H3 di terima yang berarti DER tidak mempengaruhi terhadap ETR.

Kemungkinan terjadinya pelanggaran pajak penghiindaran pajak (*tax avoidance*) sangat rendah. Demikian disebabkan dikarena tingkat utang digunakan oleh perusahaan berbeda dengan tingkat penghasilan atau laba perusahaan yang sering digunakan dalam melakukan pelanggaran pajak dengan memanfaatkan celak peraturan perpajakan.

4. Pengaruh komite audit, dewan pengawas syariah, dan leverage terhadap tax avoidance

Berdasarkan dari hasil perhitungan table 4.13 di atas menunjukkan bahwa F hitung sebesar 2,170 hasil signifikasi sebanyak 0.130. jumlah F hitung 2,170 melebihi besar dari F table (5,41) dan signifikasi F (0,103) yang sedikit kecil dari 5% atau (0,050) yang menunjukkan bahwa H4 ditolak dan H0 diterima yang maksudnya bahwa secara bersamaan variabel komite audit, dewan pengawas Syariah, dan *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap variabel *tax avoidance*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh Komite Audit (KA), Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan *Leverage* (DER) terhadap *Tax Avoidance* (ETR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018, maka ditarik kesimpulan bahwa:

1. Komite Audit (KA) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (ETR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2019.
2. Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (ETR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2019.
3. *Leverage* (DER) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (ETR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2019.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk Industri Bank Umum Syariah untuk dapat digunakan sebagai cara untuk meningkatkan kinerja dan kualitas Perbankan Syariah tersebut sehingga dapat menghindari terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2. Bagi nasabah atau pemakai jasa perbankan apalagi bank syariah seharusnya dapat memperhitungkan kerja perusahaan bankan dengan melihat laporan keuangan sudah sesuai dengan pajak yang berlaku sesuai penghasilan perbankan atau belum.
3. Untuk penelitian selanjutnya untuk dapat menambahkan periode-periode pengamatan, sampel perusahaan selain perbankan syariah dan untuk menambahkan beberapa variabel bebas yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Kepemilikan Institusional pada *Tax Avoidance*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 22(3), 2088-2116. Vol.22.3. Maret (2018): 2088-2116 ISSN: 2302-8556
- BAPEPAM, L. (2012). Peraturan Nomor IX. I. 5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Bukair, A. A. A. (2014). *Factors influencing corporate social responsibility disclosure by Islamic banks (Doctoral dissertation, Universiti Utara Malaysia)*.
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2015). Pengaruh komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan return on assets terhadap *tax avoidance*. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5(2).
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh penerapan *corporate governance*, *leverage*, *return on assets*, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 9(1), 143-161.
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi analisa *multivariate* dengan program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gupta, S., & Newberry, K. (1997). *Determinants of the variability in corporate effective tax rates: Evidence from longitudinal data. Journal of accounting and public policy*, 16(1), 1-34.
- Handayani, R. (2018). Pengaruh *Return on Assets (ROA)*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Perbankan yang *Listing* di BEI Periode Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi*, 10(1). ISSN 2085-8698 | e-ISSN 2598-4977. <http://journal.maranatha.edu>
kemenku.go.id Diakses pada Mei 2020
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. (2013). Pengaruh *Profitabilitass*, *Leverage*. *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal pada *Tax Avoidance*. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(01).
- Sartono, A. (2002). *Manajemen Keuangan; aplikasi dan teori*. BPFE: Yogyakarta.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Surbakti, T. A. V. (2012). Pengaruh karakteristik perusahaan dan reformasi perpajakan terhadap penghindaran pajak di perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2008-2010. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*.
- Tampubolon, M. P. (2005). *Manajemen keuangan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
www.bi.go.id. Diakses pada Mei 2020
- Yoehana, M. (2013). Analisis Pengaruh. *Corporate Social Responsibility*, 2010-2011.